



PEDOMAN PENGELOLAAN KAMPUNG KB

(Pedoman bagi Pengelola Kampung KB di Lini Lapangan)



**BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
TAHUN 2017**



PEDOMAN PENGELOLAAN

Kampung KB

(Pedoman bagi Pengelola Kampung KB di Lini Lapangan)

**BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
TAHUN 2017**

PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT., atas terbitnya Buku Pedoman **"Pengelolaan Kampung KB"**. Buku ini adalah Pedoman bagi Para Pengelola Program KKBPK di Lini Lapangan (PKB, PLKB, PPKBD, Sub PPKBD dan Mitra Kerja) dan Pengurus Kampung KB.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Buku ini.

Diharapkan Buku Pedoman ini dapat menjadi acuan bagi Para Pengelola Program KKBPK di lapangan dan Mitra Kerja terkait di seluruh tingkatan wilayah. Dengan adanya Buku Pedoman Pengelolaan Kampung KB diharapkan terjalin keterpaduan yang sinergis antar sektor pembangunan di Kampung KB secara nyata, sehingga dapat memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat.

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta meridhai niat dan usaha kita bersama.

Plt. Deputi Bidang Adpin,

Dr. Dwi Listyawardani, Ir., M.Sc

SAMBUTAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

Saat ini Pemerintah sedang berupaya merevitalisasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga agar program ini dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh para keluarga dan masyarakat.

Kampung KB dikembangkan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat khususnya mereka yang berada di wilayah pinggiran, miskin, padat penduduk, tertinggal, terpencil, DAS, dan wilayah nelayan di seluruh tanah air.

Selain itu, Kampung KB dikembangkan sebagai strategi untuk mendukung Nawa Cita yang merupakan prioritas pembangunan nasional, khususnya Cita ke-3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memprioritaskan daerah-daerah dan Desa dalam kerangka NKRI (Nawa Cita Ke-3).

Kami menyambut baik terbitnya Buku ini, sebagai acuan bagi Para Pengelola Program KKBPK di lini lapangan sehingga Kampung KB dapat dikelola dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kepala,

Surya Chandra Surapaty

DAFTAR ISI

Pengantar	i
Sambutan Kepala BKKBN	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Program KKBPK Bagian dari Pengentasan Kemiskinan	3
C. Latar Belakang, Sejarah, Hakikat, dan Perkembangan Kampung KB	6
D. Tujuan Kampung KB	12
E. Sasaran Kampung KB	13
F. Pengertian Kampung KB	13
G. Peran Penyuluh KKBPK (PKB/PLKB) dan PPKBD, SUB PPKBD dan Mitra Kerja	14
BAB II BAGAIMANA MEMBENTUK KAMPUNG KB	16
A. Prinsip-prinsip Pembentukan Kampung KB	16
B. Prasyarat dan Kriteria Pembentukan Kampung KB	16
C. Pendataan Potensi Wilayah	17
D. Pembentukan Pokja Kampung KB	18
E. Membangun Kesepakatan Bersama	20
F. Perencanaan Kampung KB	20
BAB III OPERASIONAL KAMPUNG KB	21
A. Pendataan dan Pemetaan Keluarga	21
B. Sarasehan Tingkat RT	23
C. Sarasehan Tingkat Kampung	24
D. Operasional Kampung KB	26
E. Pencatatan dan Pelaporan	36

BAB IV SUMBER PEMBIAYAAN KAMPUNG KB.....	38
A. Prinsip Pembiayaan Kampung KB	38
B. Sumber-sumber Pembiayaan Kampung KB	38
BAB V INDIKATOR KEBERHASILAN KAMPUNG KB .	40
A. Indikator	40
B. Indikator Proses	40
C. Indikator Output	41
BAB VI PENUTUP	43
LAMPIRAN	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Amanat Presiden Republik Indonesia, kepada BKKBN agar dapat menyusun suatu kegiatan/program yang dapat memperkuat upaya pencapaian target/sasaran Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2015-2019, kegiatan tersebut dapat menjadi ikon BKKBN serta dapat secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia di seluruh tingkatan wilayah. Dalam hal ini kemudian disepakati agar BKKBN segera dapat membentuk Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB).

Kampung KB merupakan salah satu kegiatan prioritas yang sesuai dengan instruksi Presiden RI, terutama sebagai bentuk investasi Program KB yang manfaatnya dapat secara langsung diterima oleh masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan langkah koordinasi lintas sektor,

terutama dalam integrasi kegiatan yang akan dilaksanakan di Kampung KB.

Kampung KB menjadi salah satu inovasi strategis untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program KKBPK secara utuh di lini lapangan. Kampung KB merupakan salah satu bentuk/model miniatur pelaksanaan total Program KKBPK secara utuh yang melibatkan seluruh Bidang di lingkungan BKKBN dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga, mitra kerja, *stakeholders* instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan di tingkatan pemerintahan terendah (sesuai prasyarat penentuan lokasi kampung KB) di seluruh kabupaten dan kota.

Kampung KB telah dicanangkan oleh Presiden RI pada tanggal 14 Januari 2016 di Dusun Jenawi Desa Mertasinga Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon, untuk kelanjutannya BKKBN bekerjasama dengan Kementerian dan Lembaga terkait untuk menindaklanjuti pengembangan Kampung KB. Diharapkan pada tahun 2017, setiap kecamatan mengembangkan minimal 1 (satu) kampung KB.

Segala langkah operasional Kampung KB akan dirumuskan lebih lanjut di dalam Buku Pedoman Pengelolaan Kampung KB. Buku ini sebagai pegangan bagi Penyuluh KKBPK, dan Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan, Pengurus Kampung KB serta mitra.

B. PROGRAM KKBPK MERUPAKAN BAGIAN DARI PENGENTASAN KEMISKINAN

Pembangunan keluarga sejahtera maknanya identik dengan pengentasan kemiskinan, karena tujuannya sama meningkatkan derajat kesejahteraan individu, keluarga dan masyarakat.

Secara sederhana keluarga itu akan sejahtera, apabila :
Bebannya tidak berat, ekonominya kuat, dan ketahanannya mantap.

Program pembangunan keluarga yang terakumulasi dalam KKBPK dengan empat pokok garapan yaitu Pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pemantapan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga serta ditambah dengan pengendalian,

pemantauan, pengamatan serta pembinaan penduduk merupakan bagian dari pengentasan kemiskinan.

Agar keluarga tidak mempunyai beban yang berat diawali dengan membentuk keluarga kecil yang kemudian diukur dengan rata-rata punya anak (*Total Fertility Rate*). Pembentukan keluarga kecil sangat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu perkawinan dan pengaturan kelahiran. Perkawinan yang menunjang pembentukan keluarga kecil ditentukan oleh usia dan pola perkawinan sedangkan pengaturan kelahiran melalui pemakaian kontrasepsi ditentukan oleh 3 hal yaitu tingkat kesertaan, tingkat kelangsungan KB dan efektivitas kontrasepsi dalam ber-KB.

Kestabilan dan peningkatan ekonomi keluarga tidak selalu harus berpenghasilan tinggi, akan tetapi lebih cenderung pada keseimbangan antara pengeluaran tidak melebihi pendapatan, menggali sumber ekonomi baik individual, keluarga maupun dalam lingkungan kelompok masyarakat sehingga tercapai rendahnya beban ketergantungan atau dalam istilah demografi disebut *dependency ratio*. Kegiatan pemberdayaan ekonomi

keluarga dalam program KKBPK adalah memantapkan jiwa wirausaha, permodalan, produksi dan pengemasan, pemasaran, kemitraan, dan kemandirian yang dikemas dalam kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) adalah bagian dari pengentasan kemiskinan keluarga.

Ketahanan keluarga harus diawali dengan kualitas masing-masing anggota keluarga terdiri dari bapak, ibu, anak dan anggota keluarga lainnya yang mempunyai akhlak, nilai-nilai moral yang baik dan tentunya harus dilandasi dengan pendidikan dan pemahaman agama yang kuat untuk diimplementasikan dalam keluarga dan masyarakat, hal tersebut sebagai landasan keluarga menjadi keluarga yang baik, harmonis, tidak mudah bercerai-berai sehingga terwujudnya ketahanan keluarga yang tangguh.

Ketiga unsur diatas baik perkawinan dan pengaturan kelahiran, ekonomi keluarga dan ketahanan keluarga bisa tercapai apabila keluarga melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik. Paling sedikit ada 8 fungsi keluarga yaitu : fungsi agama, fungsi sosialisasi/pendidikan, fungsi

reproduksi, fungsi ekonomi, fungsi perlindungan, fungsi kasih sayang, fungsi sosial budaya maupun pembinaan lingkungan.

Pelaksanaan delapan fungsi keluarga tidak bisa hanya dilaksanakan masing-masing keluarga, akan tetapi ada keterkaitan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain yang terhimpun dalam kesatuan di lingkungan terdekat. Itulah makna pembentukan Kampung KB masa kini dan masa yang akan datang.

C. LATAR BELAKANG, SEJARAH, HAKIKAT DAN PERKEMBANGAN KAMPUNG KB

Nama Kampung KB bukan terlahir karena ide, bentukan atau program secara khusus, akan tetapi terbentuk karena sebutan masyarakat kepada Kampung Genereh, Desa Genereh, Kecamatan Buahdua Sumedang Provinsi Jawa Barat yang saat itu pada tahun 1972 di Kampung Genereh telah menjadi pusat kegiatan KB dalam memenuhi kebutuhan masyarakat tentang alat kontrasepsi Pil, karena telah dibentuk kelompok akseptor yang dititipi persediaan Pil ulang bagi peserta KB. Setiap hari dari beberapa kampung sekitar, banyak orang pergi

ke Genereh, mengunjungi rumah ibu Suhamah sebagai Ketua kelompok Akseptor, untuk mengambil Pil ulang. Pada saat bertegur sapa di jalan, orang ditanya mau kemana?, rata-rata jawabnya "*Bade ka lembur KB, bade ngabantun pe!*" bahasa Subda, yang artinya "*mau ke kampung KB, mau mengambil pil*". Sejak itulah Genereh terkenal sebagai *Lembur KB* (Kampung KB).

Dengan demikian tiga hakikat kampung KB adalah :

1. Kampung menjadi ikon KB sebagai media kampanye penyebaran program KB;
2. Pembinaan kelangsungan ber KB yang sangat membantu terhadap penurunan angka kelahiran;
3. Pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pendekatan pelayanan.

Apabila dikaitkan dengan kondisi akhir-akhir ini, dimana TFR berdasarkan hasil SDKI selama dua periode (Sepuluh tahun) 2002-2007 dan 2007-2012 yang tidak berhasil diturunkan dan stagnan pada angka 2,6 , kemungkinan salah satu penyebabnya adalah tidak terbinanya kelangsungan ber-KB. Hal ini dikuatkan dengan faktor-faktor yang melemahnya program Kampung KB seperti

dulu, bahkan kemilau Kampung KB hampir kelam ditelan zaman.

Beberapa penguat terhadap pernyataan diatas, dapat dilihat dari kondisi sebagai berikut :

1. Peranan PPKBD, Sub-PPKBD dan Paguyuban KB tidak ditekankan kepada pembinaan peserta KB tapi lebih diarahkan kepada mencari peserta KB baru dan hal lain seperti pendataan dan sebagainya.
2. Alat pemantau kelangsungan ber-KB (R/1/Sub-PPKBD) pada umumnya sudah tidak digunakan lagi secara nasional, hanya dibeberapa daerah yang masih menggunakannya.
3. Pemenuhan Kontrasepsi hanya diperuntukan bagi rakyat miskin selebihnya dilaksanakan oleh pihak swasta (Dokter, Bidan Swasta dan Apotek) yang pemantauannya kurang tersistem, ditambah penghubung Dokter, Bidan Swasta sudah banyak ditiadakan.
4. Kejelasan capaian peserta KB baru kurang jelas apakah AB baru murni atau konversi sehingga beberapa kesan dilapangan, peserta KB baru “dari

mana asalnya? dan kemana selanjutnya?” banyak dipertanyakan.

5. Kegiatan KB di Kampung, Desa, Kecamatan yang dulu gencar dan semarak sekarang menjadi sepi, sehingga perhatian masyarakat, pemangku kepentingan menjadi acuh, kurang peduli.
6. Pemantapan peserta KB Lestari yang dulu sangat intensif dengan pendataan yang akurat, pemberian reward, melalui penghargaan dari presiden, pemberian kelapa hidrida, pemberian bibit kelinci dsb, sekarang hampir tidak ada.
7. Pendekatan dan kedekatan baik yang bersipat koordinasi maupun hubungan emosional antara petugas KB dengan aparat Desa terutama dengan para Ketua RW dan RT serta organisasi lainnya seperti DKM, tokoh-tokoh masyarakat yang dulu dekat akrab dan hangat kini semakin renggang. Para petugas cenderung hanya melakukan pendekatan dan kerjasama dengan PPKBD, Sub-PPKBD yang secara organisatoris bukan pimpinan masyarakat.

Atas dasar gambaran dan kondisi diatas maka saat ini sangat kembali diperlukan metoda/pola serta sistem Kampung KB. Dalam perjalanannya Kampung KB tidak hanya melulu pembinaan KB tetapi di beberapa daerah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan menyeluruh.

Kampung KB yang diintegrasikan dalam lomba Desa tahun 70-an menjadi Kampung KB pancakarya dengan tahapan Kampung KB swadaya, Kampung KB Swakarya dan Kampung KB Swasembada dengan inovasi yang terinspirasi dari pancakarya yaitu budi, cipta, rasa, karsa dan karya tumbuhlah kampung KB dengan kegiatan integrasi dengan pengajian, arisan, jimpitan dsb.

Tahun 2009 tercipta penjelmaan Kampung KB yang dikaitkan dengan sampah dan pariwisata. Para pencetus Kampung KB mengkaitkan apabila KB nya sukses maka sampah akan berkurang/terkendali dan pariwisata akan indah sehingga dibentuk Kampung KB di lokasi Pariwisata di Kota Sukabumi.

Banyak perkembangan Kampung KB yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, inovasi dan kreatifitas yang dibangun di masing-masing daerah. Sejarah mencatat

Kampung KB di kota Banjar Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2011 mendapatkan *Government Inovative Award*, dari Departemen Dalam Negeri yang melombakan program-program pemberdayaan dari seluruh Departemen/Lembaga diseluruh Indonesia. Inilah Kampung KB sangat membanggakan.

Pada pemerintahan Presiden Ir. H. Joko Widodo Kampung KB mendapat perhatian dan apresiasi yang tinggi, sehingga program ini dijadikan salah satu strategi dalam pengentasan kemiskinan. Pada tanggal 14 Januari 2016, Presiden telah berkenan mencanangkan Kampung KB di Dusun Jenawi Desa Mertasinga Kecamatan Gubungjati Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Tujuan yang ingin dicapai dari Kampung KB adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat yang ada di wilayah-wilayah miskin, padat penduduk, pinggiran. Selain itu, Kampung KB juga dilakukan sebagai salah satu upaya melaksanakan prioritas pembangunan nasional yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memprioritaskan daerah-daerah dan Desa dalam kerangka NKRI (Nawa Cita Ke-3).

Dari uraian tentang filsafat, sejarah dan perkembangan program KB, dapat disimpulkan bahwa hakikat Kampung KB adalah :

1. Membumikan dan Menggelorakan kembali Program KB;
2. Mendekatkan pelayanan KKBPK kepada keluarga;
3. Memantapkan 8 fungsi Keluarga dalam aplikasi kehidupan;
4. Mengintegrasikan program pembangunan lintas sektor dalam memberikan pelayanan kepada keluarga;
5. Membangun rasa memiliki Keluarga dan masyarakat terhadap program KKBPK; dan
6. Menumbuhkan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat.

D. TUJUAN KAMPUNG KB

Meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat melalui program KKBPK yang terintegritasi dengan sektor pembangunan lainnya.

E. SASARAN KAMPUNG KB

1. Sasaran Langsung

- a. Keluarga;
- b. Pasangan Usia Subur;
- c. Masyarakat;
- d. Balita, Remaja, Lansia.

2. Sasaran Tidak langsung

- a. Tokoh-tokoh masyarakat;
- b. Organisasi masyarakat (PPKBD, Sub-PPKBD, DKM, Organisasi pemuda, dsb);
- c. Petugas lapangan dan provider

F. PENGERTIAN KAMPUNG KB

Satuan wilayah setingkat RW, Dusun atau yang setara dengan kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program pembangunan antara program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga dan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.

G. PERANAN PENYULUH KKBPK (PKB/PLKB) DAN PPKBD, SUB-PPKBD SERTA MITRA KERJA

1. Peran Penyuluh KKBPK (PKB dan PLKB)
 - a. Melakukan pendekatan tokoh (formal & informal);
 - b. Mengolah dan menanalisa data potensi wilayah (bersama dengan PPKBD, Sub-PPKBD serta Paguyuban);
 - c. Melakukan advokasi kepada pemerintah desa/kelurahan dan sektor terkait;
 - d. Melakukan pembinaan PPKBD, Sub-PPKBD serta Paguyuban untuk meningkatkan kemampuan PPKBD, Sub-PPKBD serta Paguyuban;
 - e. Menggalang kemitraan dengan sektor-sektor terkait untuk penumbuhan & pengembangan Kampung KB;
 - f. Pengendalian Operasional Kampung KB;
 - g. Monitoring dan evaluasi Kampung KB.

2. Peran PPKBD, Sub-PPKBD serta Kader
 - a. Pendataan dan pemetaan sasaran dan potensi wilayah;
 - b. Pertemuan rutin;
 - c. KIE dan Konseling;

- d. Fasilitas Pelayanan Kependudukan , KB, Pembangunan Keluarga dan sektor lainnya kepada keluarga;
- e. Pembinaan Keluarga melalui kelompok kegiatan;
- f. Pengembangan;
- g. Pencatatan dari pelaporan.

3. Mitra Kerja

- a. Melakukan pembinaan kepada keluarga dan masyarakat di Kampung KB sesuai dengan bidang tugas sektornya masing-masing.
- b. Mengembangkan kegiatan-kegiatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan sector pembangunan yang dijalankannya.
- c. Fasilitasi kegiatan (fisik dan non fisik) sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Kampung KB.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi secara terpadu bersama para pengelola yang berkepentingan dalam pembinaan Kampung KB.

BAB II

BAGAIMANA MEMBENTUK KAMPUNG KB

A. PRINSIP-PRINSIP PEMBENTUKAN KAMPUNG KB

1. Kampung KB merupakan istilah yang baku (tidak diganti dengan istilah yang lain);
2. Membina dan meningkatkan kesertaan ber-KB;
3. Dibentuk untuk memantapkan 8 fungsi keluarga;
4. Pelayanan yang diberikan terintegrasi antara program KKBPK dengan lintas sektor terkait;
5. Merupakan gerakan yang diprakarsai masyarakat; dan
6. Tidak bermuatan politis didalamnya.

B. PRASYARAT DAN KRITERIA PEMBENTUKAN KAMPUNG KB

1. Prasarat :
 - a. Tersedia Data dan Informasi keluarga;
 - b. Adanya dukungan dan Komitmen Pemda;
 - c. Partisipasi Aktif masyarakat, tokoh masyarakat dan PPKBD, Sub-PPKBD serta para Kader;

2. Kriteria :

a. Kriteria Sasaran Utama:

- 1) Jumlah keluarga miskin di atas rata-rata tingkat desa dimana kampung tersebut berada;
- 2) Jumlah peserta KB tingkat desa dimana kampung tersebut berlokasi.

b. Kriteria Wilayah (pilihan sesuai kondisi) :

- 1) Kumuh;
- 2) Pesisir/Nelayan;
- 3) Daerah Aliran Sungai (DAS);
- 4) Bantaran Kereta Api;
- 5) Kawasan Miskin (termasuk miskin perkotaan);
- 6) Terpencil;
- 7) Wilayah Perbatasan;
- 8) Kawasan Industri;
- 9) Kawasan Wisata;
- 10) Tingkat Kepadatan Penduduk Tinggi.

C. PENDATAAN POTENSI WILAYAH

Sebelum pembentukan, harus dilakukan pendataan dan pemetaan potensi wilayah, yang mencakup :

1. Potensi sebagai pengelola (PPKBD, Sub-PPKBD, Paguyuban dan tokoh-tokoh masyarakat);
2. Potensi kegiatan (Poktan Tribina, Poktan kegiatan sektor lainnya yang ada di kampung);
3. Potensi pelayanan (Posyandu, Polindes, Bidan Praktek).

D. PEMBENTUKAN POKJA KAMPUNG KB

1. Untuk mengelola Kampung KB perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) atau Pengurus Kampung KB yang disepakati bersama. Pembentukan Pokja/Pengurus Kampung KB bisa dikembangkan disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, kemampuan dan muatan lain yang diinginkan di wilayah masing-masing, namun tujuannya tetap mengacu pada pelaksanaan 8 fungsi keluarga.
2. Susunan pengurus Kampung KB adalah sebagai berikut:
 - a. Pelindung/Penanggung : Kepala Desa/Lurah Jawab
 - b. Penasehat : BPD, Ketua TP-PKK Desa/Kelurahan,

PB, PPKBD/Pos KB.

- c. Ketua : Kepala Dusun /
Ketua RW / Tokoh Masyarakat
- d. Sekretaris : Sub-PPKBD/Sub-
Pos KB
- e. Bendahara : Pengurus PKK RW
- f. Seksi-seksi :
 - Seksi Keagamaan : (dipilih)
 - Seksi Sosialisasi/
Pendidikan : (dipilih)
 - Seksi Reproduksi : (dipilih)
 - Seksi Ekonomi : (dipilih)
 - Seksi Perlindungan : (dipilih)
 - Seksi Kasih Sayang : (dipilih)
 - Seksi Sosial Budaya : (dipilih)
 - Seksi Pembinaan
Lingkungan : (dipilih)

E. MEMBANGUN KESEPAKATAN BERSAMA

Setelah dibentuk Pokja Kampung KB, maka dilakukan musyawarah warga kampung untuk menyepakati pembentukan Kampung KB.

F. PEMBENTUKAN/PENCANANGAN KAMPUNG KB

Setelah warga RW/Dusun menyepakati pembentukan Kampung KB, maka Ketua/Pengurus Pokja Kampung KB mengusulkan kepada kepala Desa/Lurah/Camat untuk **mencanangkan** dan mengukuhkan terbentuknya Kampung KB.

Catatan :

Pencanangan Kampung KB dapat dilakukan dengan memanfaatkan momentum atau kegiatan strategis yang ada di daerah, yang penting dapat diketahui danaksikan oleh warga Kampung

BAB III

OPERASIONAL KAMPUNG KB.

A. PENDATAAN DAN PEMETAAN KELUARGA

Pendataan dan Pemetaan Keluarga dilaksanakan dalam dua bentuk, yaitu:

1. Pendataan Keluarga (PK) yang dilaksanakan secara Nasional, kemudian dianalisa untuk kepentingan kegiatan di masing-masing seksi diantaranya :
 - a. Sasaran Pelayanan Kependudukan;
 - b. Sasaran Pelayanan Program KB;
 - c. Sasaran Pelayanan Program Ketahanan Keluarga;
 - d. Sasaran Pelayanan pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
 - e. Sasaran Perbaikan Rumah Layak Huni;
 - f. Sasaran Peningkatan Kesehatan Lingkungan;
 - g. Sasaran Pencegahan Narkoba;
 - h. Dan lain-lain.

Contoh :

- 1) Bila di Kampung tersebut terdapat keluarga yang belum memiliki Akta Kelahiran, maka dijadikan sebagai sasaran KIE dan Pelayanan Administrasi

Kependudukan untuk mendapatkan Akta Kelahiran;

- 2) Bila dikampung tersebut terdapat sejumlah PUS yang belum ber-KB (dengan berbagai alasan), maka PUS tersebut dijadikan sebagai sasaran untuk mendapatkan pelayanan KB melalui kegiatan KIE dan pelayanan Kontrasepsi;
- 3) Bila di Kampung tersebut terdapat sejumlah keluarga yang memiliki Balita, sementara di Kampung tersebut belum memiliki kelompok BKB, maka di kampung tersebut dapat dijadikan sasaran untuk pembentukan Kelompok Bina Keluarga Balita;
- 4) Bila di Kampung tersebut terdapat sejumlah keluarga yang memiliki rumah tidak layak huni, maka keluarga tersebut dijadikan sebagai sasaran untuk gotong royong masyarakat Kampung dalam membangun rumah layak huni dengan dukungan dari lintas sector.

2. Masing-masing seksi melakukan pendataan sesuai dengan kebutuhan yang belum tercantum dalam pendataan nasional (Pendataan Keluarga), misalnya :
 - a. Pendataan tingkatan Profesi masing-masing keluarga misalnya : Petani (buruh tani, penggarap), Pedagang dengan jenis produksinya, Tukang Bangunan dan Klasifikasi Sopir dsb.
 - b. Produk unggulan masing-masing keluarga (Anyaman, Kerajinan, dsb)
 - c. Pendataan yang berkaitan dengan kebutuhan pembangunan
 - Belum punya kantor RW/Bale Sawala/Bale Kampung;
 - Membangun gang/jalan/lorong;
 - Organisasi-organisasi yang dibutuhkan.
 - d. Pendataan lainnya tentang masalah dan potensi desa yang diperlukan.

B. SARAHSEHAN TINGKAT RT

Petemuan ditingkat RT minimal dilaksanakan setiap tiga bulan sekali (atau sesuai kebutuhan masyarakat)

dipimpin oleh Ketua RT. Dilaksanakan setelah selesai analisa pendataan. Hal-hal yang dibicarakan adalah :

1. Membahas hasil pendataan kemudian dituangkan dalam peta keluarga tingkat RT;
2. Membahas masalah-masalah dan potensi yang ada ditingkat RT;
3. Menyusun Program Kerja yang akan dibawa/diusulkan di dalam rapat RW/Kampung;
4. Melaksanakan lelang kepedulian untuk membangun rumah prasejahtera (tidak layak huni).

C. SARAHSEHAN TINGKAT KAMPUNG

Sarahsehan di tingkat Kampung/RW merupakan puncak pembentukan komitmen di Kampung KB. Sarahsehan sebaiknya dilaksanakan setahun dua kali. Pada awal tahun sebagai ajang perencanaan dan evaluasi serta petengahan tahun sebagai alat pemantauan program di tahun yang sedang berjalan. Diluar itu bisa saja pertemuan dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kepentingan.

1. Peserta pertemuan

- a. Pengurus Kampung KB/Pokja;
- b. Para Ketua RT;
- c. Pengurus Organisasi di tingkat RT (DKM, Organisasi Pemuda dsb);
- d. Para Ketua Paguyuban tingkat RT;
- e. Tokoh-tokoh masyarakat;
- f. Seluruh warga satu kampung (secara selektif sesuai dengan kebutuhan).

2. Materi Pembahasan

- a. Evaluasi pelaksanaan Program tahun yang lalu;
- b. Perencanaan program tahunan yang diusulkan masing-masing RT;
- c. Pembahasan program masing-masing seksi.

Contoh :

- 1) Seksi Pendidikan merencanakan pembentukan kelompok kegiatan (Bina Bina Keluarga) dan Perpustakaan kampung.
- 2) Seksi Pembinaan Lingkungan membuat jamban keluarga dan memperbaiki jalan kampung.

- 3) Seksi Ekonomi membentuk UPPKS dan kerjasama dengan toko serbaguna dalam memasarkan produk.
- 4) Seksi Reproduksi membuat jadwal pelayanan KB, jadwal pelaksanaan posyandu.
- 5) Seksi Keagamaan membuat program magrib mengaji, sembahyang dan jadwal pengajian rutin.
- 6) Kegiatan lain yang disesuaikan dengan keinginan, kebutuhan, kemampuan dan kondisi setempat.

Hasil Sarahsehan ini merupakan salah satu bahan untuk Musrenbangdus yang kemudian dibawa kepada Musrendabngdes agar masuk dalam RPJMDes, RKPDesa dan APBDDes.

D. OPERASIONALISASI KAMPUNG KB

Kegiatan rutin Kampung KB dilaksanakan secara terus menerus oleh pengurus Pokja Kampung KB termasuk seksi-seksi dan keluarga terhadap program KKBPK dan lintas sektor terkait melalui penerapan 8 fungsi keluarga.

Diharapkan dengan adanya Kampung KB, keluarga semakin meningkat kesejahteraannya dan tidak terdapat lagi keluarga miskin di Kampung KB. Miskin tidak hanya kekurangan ekonomi tapi terhindar dari segala bentuk kemiskinan diantaranya : Miskin Harta, Miskin Ibadah, Miskin Sosial, Terhindar dari kebodohan dan keterbelakangan.

Adapun peranan/fungsi pengurus Kampung KB sebagai berikut:

1. Penanggung jawab:

- a. Bertanggung jawab secara keseluruhan tentang pembentukan pengembangan dan operasional Kampung KB;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan Kampung KB dengan sektor terkait;
- c. Mengusahakan anggaran dari dana Desa serta pihak luar untuk keperluan Kampung KB.

2. Penasehat:

- a. Memberikan masukan baik kepada penanggung jawab maupun pelaksana dalam membina mengembangkan Kampung KB;

- b. Mengadvokasi pihak-pihak yang terkait dengan Program dan kegiatan Kampung KB.

3. Ketua Pokja:

- a. Menentukan kebijakan dan strategi program kegiatan Kampung KB;
- b. Membimbing dan membina seluruh pengurus Pokja;
- c. Melakukan Koordinasi dengan semua pihak.

4. Sekretaris:

- a. Melakukan tatalaksana administrasi Kampung KB;
- b. Menerima dan mengolah laporan pelaksanaan Kampung KB;
- c. Membuat laporan dan evaluasi kegiatan Kampung KB.

5. Bendahara:

Menerima, membayar, mencatat, melaporkan dan mempertanggungjawabkan semua aktifitas keuangan Kampung KB.

6. Seksi-seksi

a. Seksi Keagamaan antara lain :

- 1) Membuat program magrib mengaji, dengan menghimbau agar keluarga-keluarga tidak menonton TV pada saat magrib tapi melaksanakan ibadah bersama dan anaknya mengaji.
- 2) Kebersamaan ibadah di gereja, Pure dsb.
- 3) Pengajian rutin baik mingguan maupun bulanan.
- 4) Mengunjungi/memotivasi keluarga-keluarga yang belum ikut dalam kegiatan keagamaan dan menghimbau agar tiap keluarga memiliki ruangan ibadah di rumah masing-masing.
- 5) Membantu/mendorong keluarga untuk zakat, infak, shodakoh bagi kepentingan umum. Misalnya memberi makan tambahan ke posyandu, wakap tanah untuk pembuangan sampah.
- 6) Mengusahakan hal-hal yang dibutuhkan bidang keagamaan kepada pemerintah yang lebih atas (Desa, Kecamatan, Kabupaten Dst).
- 7) Dsb.

b. Seksi Pendidikan/Sosialisasi antara lain:

- 1) Membentuk, membina dan mengembangkan BKB (Bina Keluarga Balita).
- 2) Membentuk membina dan mengembangkan BKR (Bina Keluarga Remaja).
- 3) Membantu membina dan mengembangkan BKL (Bina Keluarga Lansia).
- 4) Membentuk membina dan mengembangkan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).
- 5) Melaksanakan keaksaraan fungsional.
- 6) Kursus-Kursus tentang keterampilan baik yang dilaksanakan oleh dinas instansi pemerintah maupun atas prakarsa masyarakat (Kursus Perbengkelan, Tata busana dan merias pengantin) dsb.
- 7) Membina Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum).
- 8) Mengusahakan hal-hal yang dibutuhkan bidang pendidikan/sosialisasi kepada pemerintah yang lebih atas (Desa, Kecamatan, Kabupaten Dst).
- 9) Dsb.

c. Seksi Reproduksi

- 1) Memotivasi PUS untuk ber-KB.
- 2) Membina kelangsungan ber-KB.

- 3) Menyelenggarakan pembentukan, pembinaan dan pengembangan posyandu.
- 4) Membuat peta keluarga tiap RT.
- 5) Mendidik keluarga tentang kesehatan reproduksi dan reproduksi remaja.
- 6) Pembentukan PIK Remaja dan Kampanye PUP.
- 7) Melaksanakan pelayanan KB.
- 8) Melaksanakan rujukan dan pengayoman medis.
- 9) Penyediaan alat kontrasepsi bagi yang tidak mampu.
- 10) Mengkordinasikan layanan dan Pembinaan peserta KB dengan Dokter Bidan Swasta.
- 11) Pelayanan papsmear, pemeriksaan bumil dan imunisasi di Posyandu.
- 12) Mengusahakan hal-hal yang dibutuhkan bidang reproduksi kepada pemerintah yang lebih atas (Desa, Kecamatan, Kabupaten Dst).
- 13) Dsb.

b. Seksi Ekonomi

- 1) Mempromosikan potensi/profesi yang dimiliki oleh warga kampung (memasarkan tukang tembok, sopir, penjahit dsb) ke Pasar kerja.
- 2) Membina, membimbing produk-produk unggulan baik yang diproduksi masing-masing keluarga maupun dalam bentuk kelompok.
- 3) Membentuk membina dan mengembangkan usaha bersama baik UPPKS, UP2K dan KUBE.
- 4) Membentuk, membina dan mengembangkan Koperasi simpan pinjam berupa uang atau produk/hasil pertanian.
- 5) Menjalankan sistem lumbung kampung untuk kepentingan keluarga.
- 6) Iuran untuk permodalan dengan barang (palantir/Kelapa sebulan Satu butir) atau produk lain sesuai dengan potensi yang dimiliki di daerah masing-masing untuk kepentingan dan kebersamaan di kampung.
- 7) Mengusahakan hal-hal yang dibutuhkan bidang ekonomi kepada pemerintah yang lebih atas (Desa, Kecamatan, Kabupaten Dst)

8) Dsb.

c. Seksi Perlindungan

- 1) Penyuluhan anti KDRT.
- 2) Penyuluhan Narkoba.
- 3) Mengurus jaminan-jaminan kehidupan bagi keluarga (BPJS, Jamkesda).
- 4) Sistem ronda malam untuk perlindungan keamanan.
- 5) Bantuan hukum bagi keluarga yang tersangkut masalah hukum.
- 6) Ayoman sosial bagi peserta KB yang mendapat keluhan/komplikasi.
- 7) Mengusahakan pelayanan administrasi kependudukan misalnya Akta Kelahiran dan KTP.
- 8) Mengusahakan hal-hal yang dibutuhkan bidang perlindungan kepada pemerintah yang lebih atas (Desa, Kecamatan, Kabupaten Dst).
- 9) Dsb.

d. Seksi Kasih Sayang

- 1) Iuran kematian.
- 2) Donor darah untuk membantu sesama.

- 3) Jimpitan beras untuk membantu orang miskin.
- 4) Membentuk kas untuk peserta KB yang tidak bisa membeli kontrasepsi.
- 5) Jaminan Ibu bersalin (Jambulin) dan tabungan Ibu bersalin.
- 6) Bapak asuh/Ibu asuh bagi anak yang tidak bersekolah.
- 7) Pengumpulan dan pemberian pakaian layak pakai dari keluarga yang mampu kepada yang membutuhkan.
- 8) Mengusahakan hal-hal yang dibutuhkan bidang kasih sayang kepada pemerintah yang lebih atas (Desa, Kecamatan, Kabupaten Dst).
- 9) Dsb

e. Seksi Sosial Budaya

- 1) Menanamkan budaya budi pekerti di keluarga-keluarga sesuai tatakrama setempat.
- 2) Memelihara dan mengembangkan tradisi yang baik yang menjadi kebiasaan setempat.
- 3) Membentuk kelompok seni sesuai dengan kehendak bersama.

- 4) Kampanye program-program pemerintah melalui seni budaya.
- 5) Mengajarkan bahasa yang santun baik bahasa ibu maupun bahasa nasional.
- 6) Menyelenggarakan lomba-lomba budaya baik antar individu, antar keluarga maupun antar RT.
- 7) Mengusahkan hal-hal yang dibutuhkan bidang sosial budaya kepada pemerintah yang lebih atas (Desa, Kecamatan, Kabupaten Dst)
- 8) Dsb

f. Seksi pembinaan lingkungan

- 1) Kerja Bakti memelihara lingkungan.
- 2) Gerakan penanaman tanaman halaman.
- 3) Pembuangan sampah bersama dan pengurusan secara bergiliran (terjadwal).
- 4) Penataan kampung baik pembuatan jalan, gang dan pagar-pagar yang membuat keserasian dan keindahan.
- 5) Petunjuk-petunjuk jalan dan gang dengan nama yang disepakati.
- 6) Masyarakat bergotong-royong membangun rumah layak huni;

- 7) Mengusahakan hal-hal yang dibutuhkan bidang lingkungan kepada pemerintah yang lebih atas (Desa, Kecamatan, Kabupaten Dst).
- 8) Dsb

E. PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pencatatan dan pelaporan di Kampung KB pada prinsipnya mengikuti dua pola.

- a. Pencatatan dan pelaporan yang telah baku sesuai dengan aturan program dari tingkat yang lebih atas dari masing-masing instansi pemerintahan/Lembaga, misalnya laporan program KKBPK, Laporan posyandu, laporan organisasi lainnya.
- b. Pencatatan dan pelaporan khusus di Kampung KB dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - 1) Dari seksi-seksi pengurus kampung KB ke ketua Kampung KB dilaksanakan setiap bulan;
 - 2) Dari Kampung KB ke tingkat Desa/Kelurahan (Kepala Desa/Lurah) dilaksanakan setiap bulan;
 - 3) Dari Desa/Kelurahan (Kepala Desa/Lurah) ke tingkat Kecamatan (Camat) dilaksanakan setiap

- bulan, dengan tembusan kepada Kepala UPTD masing-masing Instansi terkait;
- 4) Dari Kecamatan (Camat) ke Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan dengan tembusan SKPD Kab/Kota terkait;
 - 5) Dari Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota) ke Provinsi (Gubernur) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan dengan tembusan SKPD Provinsi terkait;
 - 6) Dari Provinsi (Gubernur) ke BKKBN dilaksanakan 3 bulan sekali dengan tembusan kepada masing-masing Instansi/ Kementerian / Lembaga.
 - 7) Dari BKKBN kepada presiden melalui Kementerian Koordinator PMK dilaksanakan 3 bulan sekali dengan tembusan kepada masing-masing Instansi/ Kementerian/Lembaga.

BAB IV

SUMBER PEMBIAYAAN KAMPUNG KB

A. PRINSIP PEMBIAYAAN KAMPUNG KB

Prinsip pembiayaan Kampung KB diutamakan adalah menumbuhkan partisipasi dan kepedulian masyarakat. Oleh karena itu prinsip pembiayaan Kampung KB adalah **dari oleh** dan **untuk** warga Kampung KB itu sendiri. Namun demikian, mengingat keterbatasan kemampuan warga masyarakat yang ada di Kampung KB, maka dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam mendukung pembiayaan Kampung KB melalui sumber-sumber yang legal.

B. SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN KAMPUNG KB

1. Iuran warga Kampung KB.
2. APBDesa/Kelurahan.
3. APBD II.
4. APBN.
5. Alokasi Dana Desa
6. Dana Desa

7. Kemitraan/CSR (*Coorporation Social Responcibility*) yaitu iuran atau kepedulian perusahaan untuk pembangunan).
8. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

BAB V

INDIKATOR KEBERHASILAN KAMPUNG KB

A. INDIKATOR INPUT

1. Tingginya Partisipasi seluruh potensi Kampung untuk kemajuan Kampung KB.
2. Beragamnya kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu baik program pemerintah maupun inovasi masyarakat.
3. Besarnya sumber anggaran Kampung KB yang didapat baik dari iuran masyarakat, bantuan pemerintah maupun donatur yang tidak mengikat.
4. Ketersediaan sarana dan prasarana.

B. INDIKATOR PROSES

1. Berjalannya kegiatan dimasing-masing seksi.
2. Peranserta petugas Pemerintah dalam sinkronisasi kegiatan.
3. Peranserta institusi masyarakat dalam pengelolaan Kampung KB.
4. Menjalankan 8 (delapan) fungsi keluarga dilaksanakan disetiap keluarga.
5. Frekuensi dan kualitas kegiatan KIE/Penyuluhan.

6. Frekuensi pelayanan KB-KR.
7. Frekuensi pelayanan dari sektor lainnya.
8. Frekuensi pertemuan berkala kelompok-kelompok kegiatan (baik program KKBPK maupun kegiatan sektor terkait di Kampung KB).
9. Frekuensi kegiatan gerakan masyarakat Kampung KB

C. INDIKATOR OUTPUT

Keberhasilan kampung KB dapat diukur dari pelaksanaan 8 fungsi di masing-masing keluarga yaitu :

1. Meningkatnya pelaksanaan keagamaan (Keluarga semakin rajin beribadah).
2. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat baik ilmu pengetahuan maupun profesionalisme (semakin banyak orang yang memiliki keterampilan untuk meningkatkan usaha).
3. Tercapainya rata-rata dua anak setiap keluarga, keluarga sehat, anak tumbuh dan berkembang dengan baik.
4. Meningkatnya *income* per kapita keluarga dan pemanfaatannya menunjang kepentingan keluarga.

5. Terlindunginya masyarakat/keluarga dan hidup tentram dan nyaman.
6. Semakin terjalinnya hubungan harmonis antar anggota keluarga dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
7. Semakin berkembangnya budi pekerti, tata krama dan seni budaya baik di keluarga maupun masyarakat sekampung.
8. Semakin tertatanya lingkungan yang serasi selaras dan seimbang antara perilaku dan lingkungan.

Keterangan:

Sebagai alat ukur keberhasilan Kampung KB dapat dilihat dari: Hasil Pendataan Keluarga (PK) yang dimutakhirkan setiap tahunnya oleh para kader KB (PPKBD, Sub PPKBD); dan atau alat ukur lainnya yang dikembangkan oleh Pokja dan disepakati bersama.

BAB VI

PENUTUP

Kampung KB dikembangkan sebagai upaya untuk revitalisasi program KKBPK yang selama beberapa dasawarsa terakhir ini mengalami kemunduran.

Kampung KB diharapkan dapat menjadi solusi strategis dalam penguatan Program KKBPK dan Pembangunan sektor terkait di seluruh tingkatan wilayah, terutama sebagai suatu langkah implementasi kegiatan prioritas yang memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian target/sasaran yang telah ditetapkan, serta untuk memperluas cakupan penggarapan Program KKBPK yang dapat diterima manfaatnya secara langsung oleh masyarakat

Buku ini diharapkan dapat dijadikan pedoman/acuan operasional bagi para pengelola dan pelaksana program KKBPK dalam pengembangan Kampung KB di seluruh Indonesia.

Lampiran 1.

Formulir Laporan Kampung KB untuk tingkat Kampung yang ditujukan kepada Kepala Desa dan ditembuskan kepada Kepala UPT KB di tingkat Kecamatan.

Laporan Perkembangan Kampung KB
(Kampung KB)
Tahun 2017

Indikator Input

No	Variabel	Kondisi Awal	BULAN											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Jumlah Tenaga Pengelola Kampung a. Penyuluh KKBP (PKB/PLKB) b. Perangkat Desa/Dusun/RW/RT/Toga/Toma/Todat c. Kader Program KKBP d. Masyarakat													
2	Jumlah Kepemilikan Sarana dan Prasarana a. Ruang Sekretariat b. Rak Buku c. Meja d. Kursi e. Komputer / Laptop f. Printer g. Kamera h. (Lainnya. Sebutkan)													
3	Jumlah Keterlibatan Pemerintah Daerah/Lintas Sektor/Mitra a. Pemerintah Daerah b. Dinas Kesehatan c. Dinas Pendidikan d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa e. Disperindagkop f. Balai Pelatihan Tenaga Kerja g. (Lainnya. Sebutkan)													
4	Jumlah Sumber Dana a. APBN (misal: BKKBN; Kemenkes; dst) b. APBD (misal: Dana Desa; Dana Alokasi Desa) c. Perusahaan (misal: PT. Chevron) d. Donasi Masyarakat (misal: Sumbangan Haji Amron) e. Swadaya (mis: Kas Kampung KB)													

Indikator Proses															
No	Variabel	Instansi Komponen Pembina Kegiatan	Kondisi Awal	BULAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Frekuensi Kegiatan Seksi Keagamaan	Kemenag Kab Mesjid Agung Kemenag Kab													
	a. Gerakan sholat berjamaah														
	b. Kajian Alquran														
	c. Sekolah Minggu														
	d. (Lainnya. Sebutkan)														
2	Frekuensi Kegiatan Seksi Pendidikan														
	a. Membentuk, membina dan mengembangkan BKB	OPD KB Kab													
	b. Pertemuan dan kegiatan BKB	OPD KB Kab													
	c. Membentuk, membina dan mengembangkan BKR	OPD KB Kab													
	d. pertemuan dan kegiatan BKR	OPD KB Kab													
	e. Membentuk, membina dan mengembangkan BKL	OPD KB Kab													
	f. pertemuan dan kegiatan BKL	OPD KB Kab													
	g. Membentuk, membina dan mengembangkan PAUD	OPD KB Kab													
	h. Penyuluhan dan sosialisasi Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga	RRR													
	i. Pengupayaan Beasiswa	CSR PT Pertamina													
	j. Penyelenggaraan Paket A	Dinas Pendidikan													
	k. Penyelenggaraan Paket B	Dinas Pendidikan													
	l. Penyelenggaraan Paket C	Dinas Pendidikan													
	m. (Lainnya. Sebutkan)														

Indikator Proses																
No	Variabel	Instansi Komponen Pembina Kegiatan	Kondisi Awal	BULAN												
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nov	Des	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
3	Frekuensi Kegiatan Seksi Reproduksi a. Memotivasi PUS untuk ber-KB b. Membina kelangsungan ber-KB c. Membentuk, membina dan mengembangkan Posyandu d. Penggerakan Pelayanan Kontrasepsi e. Pembentukan PIK Remaja dan Kampanye PUP f. Melaksanakan rujukan dan pengayoman medis g. Penyuluhan Kespro oleh tenaga medis h. Pelayanan papsmear, pemeriksaan bumil dan imunisasi di Posyandu i. (Lainnya. Sebutkan)	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan														
4	Frekuensi Kegiatan Seksi Ekonomi warga b. Membina, membimbing produk-produk unggulan c. Membentuk, membina dan mengembangkan UPPKS, UP2K, KUBE d. Koperasi Simpan Pinjam dan Permodalan e. Upaya pendistribusian hasil warga f. Pelatihan Keterampilan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan h. Penyaluran tenaga kerja i. (Lainnya. Sebutkan)	Disperindag														

Indikator Proses

No	Variabel	Instansi Komponen Pembina Kegiatan	Kondisi Awal	BULAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5	Frekuensi Kegiatan Seksi Perlindungan a. Penyuluhan anti KDRT b. Ronda malam c. Konsultasi hukum d. Pemberian JKN PBI e. Pelayanan pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Akte Kematian f. Pembuatan Sertifikat Tanah g. (Lainnya. Sebutkan)														
6	Frekuensi Kegiatan Seksi Kasih Sayang a. Iuran Sosial Kemasyarakatan b. Pemberian bantuan c. Orang Tua Asuh f. Pelaksanaan Sunatan massal g. Pelaksanaan nikah massal h. (Lainnya. Sebutkan)														
7	Frekuensi Kegiatan Seksi Sosial Budaya a. Memelihara dan mengembangkan nilai dan norma kampung b. Membentuk kelompok seni c. Pelestarian bahasa dan tradisi kampung d. (Lainnya. Sebutkan)														
8	Frekuensi Kegiatan Seksi Pembinaan Lingkungan a. Kerja bakti memelihara lingkungan b. gerakan menanam pohon c. gerakan apotik hidup d. Penyediaan Tong sampah e. Pembangunan kakus f. Pembangunan rumah layak huni														
9	Pertemuan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Pokja dengan mitra yang terlibat dalam kegiatan														

Catatan:

kegiatan per seksi menyesuaikan dengan Kebutuhan Kampung KB

Indikator Output

No	Variabel	Kondisi Awal	BULAN											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Jumlah Kesertaan ber-KB per Mix Kontrasepsi													
	a. MOP													
	b. MOW													
	c. IUD													
	d. Implan													
	e. Suntik													
	f. Pil													
	g. Kondom													
2.	Jumlah PUS yang tidak pakai KB													
	a. Karena hamil													
	b. Karena menginginkan anak segera													
	c. Karena menginginkan anak kemudian													
	d. Karena tidak menginginkan anak													
3.	Jumlah BKB													
	a. Jumlah BKB Dasar													
	b. Jumlah BKB Berkembang													
	c. Jumlah BKB Paripurna													
4.	Jumlah BKR													
	a. Jumlah BKR Dasar													
	b. Jumlah BKR Berkembang													
	c. Jumlah BKR Paripurna													
5.	Jumlah BKL													
	a. Jumlah BKL Dasar													
	b. Jumlah BKL Berkembang													
	c. Jumlah BKL Paripurna													
6.	Cakupan Kesertaan Keluarga dalam Poktan													
	a. BKB													
	= $\frac{\text{Jumlah Keluarga yang bergabung dalam BKB}}{\text{Jumlah keluarga yang memiliki Balita}} \times 100$													
	b. BKR													
	= $\frac{\text{Jumlah Keluarga yang bergabung dalam BKR}}{\text{Jumlah keluarga yang memiliki Remaja}} \times 100$													
	c. BKL													
	= $\frac{\text{Jumlah Keluarga yang bergabung dalam BKL}}{\text{Jumlah keluarga yang memiliki Lansia}} \times 100$													
	d. UPPKS													
	= $\frac{\text{Jumlah Keluarga yang bergabung dalam UPPKS}}{\text{Jumlah keluarga}} \times 100$													
	e. PIK R													
	= $\frac{\text{Jumlah Remaja yang bergabung dalam PIK R}}{\text{Jumlah Remaja}} \times 100$													

(Nama Kampung, tanggal pelaporan)
Kepala Kampung KB/ Ketua Pokja

ttd

(Nama)

Lampiran 2.

Formulir Laporan Kampung KB untuk tingkat Kecamatan ditujukan kepada Bupati/Walikota ditembuskan kepada OPDKB di tingkat Kabupaten/Kota.

Laporan Perkembangan Kampung KB s.d Triwulan

Kecamatan:

No	Desa	Kampung KB	Indikator Input	Indikator Proses		Indikator Output															
			Instansi/lembaga yang Terlibat	Intervensi Kegiatan per Seksi	Jumlah Pertemuan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Pokja dengan mitra yang terlibat dalam kegiatan	Jumlah Kesertaan PUS ber-KB								Partisipasi Keluarga dalam Kegiatan Poktan				Jumlah Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan			
						Pakai				Tidak Pakai								JKN Non PBI	JKN PBI	Asuransi swasta	Tidak Memiliki
						MOP	MOW	IMPLAN	IUD	SUNTIK	PIL	KONDOM	TIAL	IAK	IAS	HAMIL	BKB	BKR	BKL	UPPKS	
11)	Sukamaju	1) Kampung KB "alwalit"	a. Seksi Keagamaan																		
		1) Depag Kab....	1) Pendistribusian Kitab Suci sesuai agama																		
		2) Mesjid Agung	2) Gerakan sholat berjamaah																		
			b. Seksi Pendidikan																		
		3) Diknas Kab	1) Pendaftaran Kejar Paket A/B/C																		
		4) Perpustakaan	2) Perpustakaan keliling																		
			c. Dst																		
		2) Kampung KB "Zanakukup"																			
Jumlah																					

Lampiran 3.

Formulir Laporan Kampung KB untuk tingkat Kabupaten/Kota ditujukan kepada Gubernur ditembuskan kepada Perwakilan BKKBN Provinsi

Laporan Perkembangan Kampung KB
s.d Triwulan

Kabupaten/kota																						
No	Kecamatan	Desa	Kampung KB	Indikator Input	Indikator Proses		Indikator Output															
							Instansi/lembaga yang Terlibat	Intervensi Kegiatan per Seksi	Jumlah Pertemuan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Pokja dengan mitra yang terlibat dalam kegiatan	Jumlah Kesertaan PUS ber-KB								Partisipasi Keluarga dalam Kegiatan Poktan				Jumlah Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan
					Pakai					Tidak Pakai				JKN Non PBI	JKN PBI	Asuransi swasta	Tidak Memiliki					
					MOP	MOW				IMPLAN	IUD	SUNTIK	PIL					KONDOM	TIAL	IAK	IAS	HAMIL
		1) Sukamaju	1) Kampung KB "alwalit"		a. Seksi Keagamaan																	
				1) Depag Kab....	1) Pendistribusian Kitab Suci sesuai agama																	
				2) Mesjid Agung	2) Gerakan sholat berjamaah																	
					b. Seksi Pendidikan																	
				3) Diknas Kab	1) Pendaftaran Kejar Paket A/B/C																	
				4) Perpustakaan	2) Perpustakaan keliling																	
					c. Dst																	
			2) Kampung KB "Zanakukup"																			
Jumlah																						

Lampiran 4.

Formulir Laporan Kampung KB untuk tingkat Provinsi ditujukan kepada BKKBN Pusat

**Laporan Perkembangan Kampung KB
s.d Triwulan**

Provinsi:

No	Kabupaten/kota	Kecamatan	Desa	Kampung KB	Indikator Input	Indikator Proses		Indikator Output																		
					Instansi/lembaga yang Terlibat	Intervensi Kegiatan per Seksi	Jumlah Pertemuan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Pokja dengan mitra yang terlibat dalam kegiatan	Jumlah Kesertaan PUS ber-KB										Partisipasi Keluarga dalam Kegiatan Poktan				Jumlah Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan				
								Pakai					Tidak Pakai									JKN Non PBI	JKN PBI	Asuransi swasta	Tidak Memiliki	
								MOP	MOW	IMPLAN	IUD	SUNTIK	PIL	KONDOM	TIAL	IAK	IAS	HAMIL	BKB	BKR	BKL	UPPKS				
		1) Sukamaju	1) Kampung KB "alwalit"		a. Seksi Keagamaan																					
					1) Depag Kab....	1) Pendistribusian Kitab Suci sesuai agama																				
					2) Mesjid Agung	2) Gerakan sholat berjamaah																				
						b. Seksi Pendidikan																				
					3) Diknas Kab	1) Pendaftaran Kejar Paket A/B/C																				
					4) Perpustakaan	2) Perpustakaan keliling																				
						c. Dst																				
				2) Kampung KB "Zanakkukup"																						
Jumlah																										

Rekap Kampung KB menurut Provinsi

Laporan Perkembangan Kampung KB s.d Triwulan

Indonesia

[illegible]

Keterangan*

- 1 Seksi Keagamaan
- 2 Seksi Pendidikan
- 3 Seksi Reproduksi
- 4 Seksi Ekonomi
- 5 Seksi Perlindungan
- 6 Seksi Kasih sayang
- 7 Seksi Sosial Budaya
- 8 Seksi Pembinaan Lingkungan